



# LAPORAN DELEGASI

**KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA *FOCUS GROUP DISCUSSION***

**“Balancing the Economy and Environment in the Struggle of Post Covid-19 Recovery: Promoting System of Environment Economic Accounting in Financial Oversight of the Parliament”**

**Bogor, Jawa Barat  
2-3 Februari 2021**



**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA**  
**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

*Focus Group Discussion (FGD)*

*”Balancing the Economy and Environment in the Struggle of Post COVID-19 Recovery:  
Promoting System of Environmental Economic Accounting in Financial Oversight of the  
Parliament”*

**BOGOR, JAWA BARAT**

**2-3 Februari 2021**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI**

Pelaksanaan *Focus Group Discussion (FGD)* pada tanggal 2-3 Februari 2021 di Bogor, Jawa Barat didasarkan pada Keputusan Pimpinan BKSAP DPR RI tanggal 11 Januari 2021.

**B. SUSUNAN DELEGASI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Dr. Fadli Zon, SS. M.Sc	F. P.Gerindra/ A-086	Ketua BKSAP
2.	Charles Honoris	F. PDI P/ A-162	Wakil Ketua BKSAP
4.	Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng	F. PKS/	Wakil Ketua BKSAP

		A-422	
5.	Ir.H. A.Hafisz Tohir	F. PAN/ A-487	Wakil Ketua BKSAP
6.	Ir. Efendi Sianipar	F. PDI P/ A-144	Anggota BKSAP
7.	H. Andi Achmad Dara, SE	F. P. Golkar/ A-326	Anggota BKSAP
8.	Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos, M.Si	F. P. Gerindra/ A-078	Anggota BKSAP
9.	Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M.	F. P. Demokrat/ A-546	Anggota BKSAP
10.	Nazaruddin Dek Gam, SH	F. PAN/ A-478	Anggota BKSAP
11.	Drs.Fathan	F. PKB/ A-018	Anggota BKSAP
12.	Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.	F. PKS/ A-449	Anggota BKSAP
13.	Ema Ummyatul Chusnah	F. PPP/ A-471	Anggota BKSAP
14.	Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.	F. P. Nasdem/ A-403	Anggota BKSAP

### C. VISI DELEGASI

- Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang agenda pertumbuhan hijau Indonesia dalam rencana pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19, kemajuannya pencapaian Nationally Determined Contributions (NDC) untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca, dan penggunaan data The System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) oleh pemerintah untuk memantau kemajuan dan memahami interaksi antara degradasi lingkungan dan kekayaan nasional.

- Bertukar pengalaman dengan Public Account Committee House of Commons Inggris mengenai audit dan pengawasan terhadap agenda pertumbuhan hijau dan perubahan iklim.
- Mengeksplorasi peluang penggunaan SEEA dalam pengawasan keuangan parlemen.

#### D. MISI DELEGASI

- Kepentingan indikatif dan kolaborasi lebih lanjut DPR dan Westminster Foundation for Democracy (WFD) untuk mendorong pengawasan keuangan terhadap pertumbuhan hijau
- Menghimpun masukan dan materi yang relevan untuk penyusunan Buku Putih BKSAP tentang Ekonomi Hijau dan Demokrasi Lingkungan

#### E. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Materi yang dijadikan referensi bagi Delegasi dan Ketua BKSAP DPR RI diolah oleh Regional Representative Westminster Foundation for Democracy (WFD), Tenaga Ahli dan Sekretariat KSI BKSAP berupa TOR, Agenda Pertemuan, Pidato dan Saran Butir Wicara.

## II. ISI LAPORAN

### A. AGENDA KUNJUNGAN KERJA

JADWAL	TOPIK	NARASUMBER
<b>2 Februari 2021</b>		
12.00 - 13.00	Makan Siang	
14.00 – 14.30	Kata Sambutan	1. <b>Dr. Fadli Zon, MP</b> , Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen 2. <b>Dr. Ir. Hj. Syarifah Sofiah D., M.Si.</b> , Sekretariat Daerah Kota Bogor, Jawa Barat 3. <b>Matthew Hedges</b> , Direktur Asia-Amerika WFD  Moderator: <b>Endah T.D. Retnoastuti</b> , Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen

14.30 – 16.00	<p><b>Toward Balancing the Economy and Environment:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Boosting Economic Growth via Sustainable Business and Industries;</i></li> <li>• <i>Assessing the Progress of Indonesian Climate NDCs and Green Growth Agenda;</i></li> <li>• <i>Adopting System of Environmental Economic Accounting (SEEA).</i></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Rafael Jimenez Aybar</b>, Senior Adviser on Environmental Democracy, The Westminster Foundation for Democracy (WFD)</li> <li>2. <b>Prof. Dr. Arief Sabdo Yuwono</b>, M.Sc., Kepala divisi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor (IPB)</li> <li>3. <b>Etjih Tasriah</b>, Ahli Statistik Senior, Badan Pusat Statistik (BPS)</li> </ol> <p>Moderator: <b>Agus Wijayanto</b>, Perwakilan WFD di Indonesia</p>
16.00 – 17.30	<p><b>Promoting Green Growth through Parliamentary Financial Oversight:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sharing best practice of the House of Commons' PAC in Scrutinising UK's Net Zero 2050 Agenda;</i></li> <li>• <i>Sharing BAKN's Experience in Scrutinising the GOI's spending for Energy Subsidy and its possible effects on renewable energy development of Indonesia.</i></li> <li>• <i>Parliament's Possible Contributions to balance economic growth and environmental protections</i></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Richard Holden MP</b>, Anggota Parlemen Inggris, Badan Akuntabilitas Keuangan Publik (Virtual)</li> <li>2. <b>Sugeng Suparwoto</b> Ketua Komisi VII, Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI</li> <li>3. <b>Dr. Rita Parmawati</b>, Departemen Sains Lingkungan, Universitas Brawijaya</li> </ol> <p>Moderator: <b>Dewi Amelia Tresna Wijayanti</b>, Tenaga Ahli Badan Kerja Sama Antar Parlemen</p>
17.30 – 17:45	Penutup	<b>Dr. Fadli Zon, MP</b> , Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen
<b>3 February 2021</b>		
09:00 – 12.00	<b>Rencana Aksi:</b> <i>Exploring further collaboration of DPR and WFD to follow up the event</i>	Fasilitator – Agus Wijayanto

## B. SITUASI UMUM

Dalam kunjungan kerja ini BKSAP mengambil format *Focus Group Discussion (FGD)* yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas kegiatan dan memudahkan dialog antara berbagai pemangku kepentingan. *Focus Group Discussion* dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD).



Dr, Fadli Zon, Ketua BKSAP memberikan kata sambutan

FGD dibuka oleh **Dr. Fadli Zon**, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI. Dalam sambutan pembukaan, Dr. Fadli Zon menyampaikan bahwa pandemi telah membuat berbagai negara memikirkan kembali paradigma ekonomi saat ini yang berpusat pada pertumbuhan, yang telah menginspirasi kebijakan ekonomi nasional dan internasional yang ada. Banyak negara telah menyadari kekeliruan memperlakukan ekonomi sebagai sebuah supremasi di mana pertumbuhan adalah segalanya. Pembangunan kembali pasca pandemi seharusnya tidak hanya terpusat pada PDB dan mempertimbangkan nilai kelestarian alam. Pemerintah harus tergerak untuk mengubah kebijakan publik mereka ke arah penyalarsan

lingkungan dan ekonomi. Di Indonesia misalnya, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dalam agenda kebijakannya, keseimbangan antara menjaga pertumbuhan ekonomi, memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Merupakan mandat konstitusional bagi anggota parlemen untuk melakukan pengawasan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu BKSAP bekerja sama dengan WFD merancang program dengan FGD ini yang bertujuan untuk mensosialisasikan pertumbuhan hijau dan memperkenalkan anggota parlemen pada *System of Environmental Economic Accounting (SEEA)* guna memperkuat kapasitas anggota parlemen dalam pengawasan keuangan kebijakan pemerintah terkait dengan pertumbuhan hijau.



Syarifah Sofiah Dwikorawati, Sekretaris Daerah Kota Bogor memaparkan upaya Kota Bogor menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan

Sekretaris Daerah Kota Bogor, **Syarifah Sofiah Dwikorawati**, mewakili Walikota Bogor menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan FGD ini. Bogor merupakan salah satu kota yang tidak terhindar dari dampak degradasi lingkungan. Saat ini Bogor tengah berupaya

untuk melakukan pembenahan, meningkatkan kesiapsiagaan, dan menuju visi menjadi *resilient city*. COVID-19 memberikan peringatan dan menjadi *wakeup call* bagi banyak pihak bahwa kesenjangan antara ekonomi dan lingkungan adalah suatu hal yang nyata. Di tengah situasi pandemi, tentunya merupakan tantangan tersendiri untuk menyeimbangkan antara lingkungan dan pembangunan ekonomi. Sekda Kota Bogor menyampaikan juga situasi terkini terkait COVID-19 di Kota Bogor. Saat ini terdapat 8615 orang terinfeksi, umumnya melalui transmisi lokal. Pemerintah daerah (Pemda) Kota Bogor berupaya untuk selalu memperbaharui Peraturan Daerah (Perda) dan legislasi yang menaungi penanganan COVID-19 di wilayah Bogor. Sampai hari ini telah terdapat 17 kali perubahan Perda dan legislasi. Pemda Kota Bogor juga bekerjasama dengan berbagai pihak dalam penyediaan sarana kuratif seperti kamar isolasi. Sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional telah diberikan bantuan subsidi untuk hotel, restoran dan UMKM.



Matthew Hedges memberikan paparannya secara virtual



**Matthew Hedges**, Director for Asia and Americas of WFD, Former UK Ambassador to Paraguay and Deputy Ambassador to Myanmar, menyampaikan bahwa mereka menyambut baik pelaksanaan *Focus Group Discussion* yang berkolaborasi dengan BKSAP DPR RI. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah RI di dalam rancangan pembangunan menengah 2020-2024, di mana salah satunya adalah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemenuhan target penurunan emisi. Pemerintah Indonesia juga telah memberikan komitmen sukarela untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GMK) sejak tahun 2009, yaitu sebesar 26% untuk dicapai pada tahun 2020 dan 41% untuk dicapai pada tahun 2030 dengan dukungan internasional. Komitmen ini ditegaskan dalam dokumen NDC yang diluncurkan pada November 2016, yang memprioritaskan empat sektor, termasuk penurunan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), termasuk di lahan gambut.

Berdasarkan konteks di atas sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah Indonesia, dimana Parlemen merupakan salah satu pilar penting kesuksesan upaya tersebut, Westminster Foundation for Democracy (WFD) mengadakan FGD untuk menghimpun pandangan dan menjajaki peluang bagi peran parlemen yang lebih aktif, khususnya pandangan dari sisi keuangan tentang kinerja Pemerintah dalam pertumbuhan hijau. Beberapa hal penting yang kami ajukan untuk diangkat, yaitu: situasi terkini agenda pertumbuhan hijau Indonesia, kemajuan Indonesia terhadap NDC, penggunaan sistem neraca ekonomi dan lingkungan (*the System of Environmental Economic Accounting* [SEEA]) oleh Pemerintah, dan potensi SEEA digunakan sebagai alat pengawasan keuangan oleh DPR RI, khususnya BAKN DPR RI, dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI. Diskusi ini juga bertujuan mengetahui praktik baik di parlemen lain, termasuk Public Accounts Committee (PAC) dari House of Commons di Inggris.



Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi VII dan Anggota BAKN menyatakan komitmennya dalam pengembangan energi baru dan terbarukan

Sesi pertama terdiri dari empat pembicara. Pembicara pertama adalah **Sugeng Suparwoto** Ketua Komisi VII dan Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Sugeng Suparwoto menyampaikan bahwa tema energi terbarukan harus terus menjadi fokus parlemen. Dalam implementasinya, energi terbarukan harus mendapatkan perhatian dalam bentuk insentif dan subsidi. Namun, pengalihan subsidi energi tentu menimbulkan distorsi. Perlu diperhatikan bahwa subsidi pemerintah pada bahan bakar diesel masih cukup besar, sedangkan penggunaan mesin diesel bukan merupakan jenis energi yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, peran negara untuk meningkatkan subsidi energi bersih dalam hal ini energi terbarukan sangat dibutuhkan. BAKN sendiri akan berperan agar subsidi antara energi fosil dan energi baru terbarukan berjalan seimbang, tepat sasaran, dan mendukung pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan.



Rafael Jimenez Aybar memberikan paparannya secara virtual

Pembicara kedua, **Rafael Jimenez Aybar**, Senior Adviser on Environmental Democracy, WFD. Rafael Jimenez Aybar menyampaikan salah satu upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 adalah pemberian stimulus oleh pemerintah. Parlemen perlu mengambil peran dan mendorong penggunaan stimulus ekonomi tersebut pada implementasi pembangunan yang ramah lingkungan. Dengan demikian, negara-negara di dunia segera dapat mencapai *net zero*.



Prof. Dr. Arief Sabdo Yuwono, M.Sc memaparkan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan

Pembicara ketiga, **Prof. Dr. Arief Sabdo Yuwono, M.Sc.**, Kepala divisi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor (IPB) menyampaikan paparan mengenai kemajuan pencapaian NDC dan implementasi ekonomi hijau. Dalam paparan tersebut disampaikan mengenai keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Saat ini masih menjadi tantangan untuk mengurangi gas rumah kaca dan mencapai komitmen pemerintah. Tetapi terdapat berbagai inovasi yang memungkinkan aktifitas yang direkomendasikan berwujud *high tech* maupun *low tech*. Pengurangan emisi gas rumah kaca dapat dimulai dari skala terkecil, yaitu keluarga dan rumah tangga.

**Etjih Tasriah**, Ahli Statistik Senior, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan presentasi mengenai implementasi SEEA di Indonesia. SEEA merupakan sistem pencatatan akuntansi yang merupakan kerangka konstektual untuk menjelaskan interaksi ekonomi dan lingkungan. Indonesia telah memiliki Sisnerling yang disusun sejak tahun

1990 dan mulai mengalami elevasi akhir-akhir ini setelah BPS mengadopsi SEEA. Saat ini juga telah dimulai upaya untuk mensinergikan SEEA dengan rencana pembangunan nasional.



Etjih Tasriah memberikan paparannya secara virtual

Selanjutnya, presentasi melalui video dari **Alessandra Alfieri**, Chief Environmental Economic Accounts Section, UN Department of Economic and Social Affairs, menjadi pembuka sesi kedua. Melalui video ini Alessandra Alfieri menyampaikan pengenalan terhadap *System of Environmental Economic Accounting* (SEEA). SEEA adalah sistem statistik yang menyatukan informasi ekonomi dan lingkungan ke dalam kerangka umum untuk mengukur kondisi lingkungan, kontribusi lingkungan terhadap perekonomian, dan dampak ekonomi terhadap lingkungan. SEEA berisi serangkaian konsep standar, definisi, klasifikasi, aturan, dan tabel akuntansi yang disepakati secara internasional untuk menghasilkan statistik yang dapat dibandingkan secara internasional. SEEA dapat membantu pembuat kebijakan untuk mengisi gap antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.

Pembicara kedua, **Dr. Rita Parmawati**, Departemen Sains Lingkungan Universitas Brawijaya menyampaikan paparan mengenai pertumbuhan hijau. Krisis yang dihadapi saat ini memberikan momentum untuk menghidupkan kembali perekonomian. COVID-19 memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk mempertimbangkan kembali kebijakan pembangunan ekonomi yang diambil saat ini, dan mulai menyelaraskan kembali kebijakan ekonomi dengan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan. Diyakini bahwa pertumbuhan hijau dapat menghasilkan lebih banyak lapangan kerja dengan mengurangi akibat negatif bagi lingkungan.



Dr. Mardani Ali Sera memberikan pandangannya terkait keseimbangan antara aspek ekonomi dan lingkungan

Dalam sesi diskusi terdapat beberapa poin yang harus digarisbawahi. Wakil Ketua BKSAP, **Dr. Mardani Ali Sera**, menyampaikan pertanyaan mengenai stimulus dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengkombinasikan stimulus sehingga dapat mencapai keseimbangan di era pembangunan kembali pasca COVID-19. Menanggapi pertanyaan tersebut, **Rafael Jimenez Aybar** menegaskan pentingnya pengalihan subsidi energi ke pengembangan energi baru terbarukan serta semaksimal mungkin menggunakan stimulus

pemulihan ekonomi pasca COVID-19 pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan.

Selain itu disampaikan juga pertanyaan mengenai NDC dan target-target yang tidak tercapai. Faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan agar target-target tersebut dapat terpenuhi. Menanggapi pertanyaan ini, **Prof. Dr. Arief Sabdo Yuwono, M.Sc.** menekankan pada unsur terkecil, yakni peran rumah tangga pada penerapan *green economy* melalui pemilahan sampah organik-non organik yang dihasilkan tiap keluarga. Di samping itu peran pemerintah lokal maupun daerah untuk menekan *greenhouse gas emission* melalui kegiatan bersepeda atau mendorong penggunaan kendaraan umum ke kantor.



Delegasi DPR RI berfoto bersama

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

- Poin-poin substantif yang dihasilkan kegiatan ini dapat ditindaklanjuti sebagai rekomendasi tindak lanjut di FGD selanjutnya.
- Melihat antusiasme peserta dalam mengikuti acara ini, BKSAP diharapkan terus melakukan kegiatan serupa dengan melibatkan akademisi dan para pakar.
- BKSAP agar terus melakukan inovasi dalam format FGD. Ke depannya diharapkan FGD dapat terus mengangkat tema-tema spesifik yang dapat mendukung diplomasi BKSAP dalam sidang-sidang internasional untuk memperjuangkan Kepentingan Nasional RI

### IV. PENUTUP

#### A. ANGGARAN

Anggaran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan sidang ini adalah Rp. 277.341.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

#### B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran sebagai berikut:

- *Paparan narasumber*
- *Dokumentasi*
- *Liputan media elektronik*
- *Kliping berita media cetak*

#### C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Kunjungan Kerja FGD pada tanggal 02-03 Februari 2021 di Bogor, Jawa Barat. Dokumen terkait akan dijadikan lampiran. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2021

Ketua Delegasi,



**Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc.**

A-86



# DOKUMENTASI



**Achmad Hafisz Tohir, Wakil Ketua BKSAP (F-PAN)**



**Effendy Sianipar (F-PDIP)**



**Andi Achmad Dara (F-Golkar)**



**Himmatul Aliyah (F-Gerindra)**



**Fathan (F-PKB) & Ema Umiyatul Chusnah (F-PPP)**



**Didi Irawadi Syamsuddin (F-PD)**



**Djazuli Juwaini (F-PKS)**



**Nazarudiin Dek Gam (F-PAN)**



**Opening Remarks**  
**Hon. Dr. Fadli Zon, MP**  
**Chair of the Committee for Inter-**  
**Parliamentary Cooperation**  
**The House of Representatives of**  
**the Republic of Indonesia**

*Excellency Ambassador Matthew Hedges, Director for Asia and the Americas of the Westminster Foundation for Democracy,*  
*Dr. Syarifah Sofiah D., Bogor City Secretary*  
*Honorable Mr. Richard Holden, MP., Member of the UK House of Commons' Public Accounts Committee,*  
*Honorable Mr. Sugeng Suparwoto, MP., Chair of House Commission VII and Member of Public Accounts Committee of the House of Representatives,*  
*Honorable Vice Chairs and Distinguished Members of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation,*  
*Distinguished panellists,*  
*Ladies and Gentlemen,*

***Assalamualaikum Wr, Wb.***

***Peace be upon us all,***

Firstly, on behalf of the Committee for Inter Parliamentary Cooperation of the Indonesian House of Representatives, allow me to extend my warm welcome and appreciation for all the support we have received for this Forum.

Last year we have been engaged in a series of discussion held by our Committee in partnership with the Westminster Foundation for Democracy (WFD) on the pillars of Environmental Democracy. Kindly allow me to thank WFD for the on-going cooperation, and the collaborative efforts in organizing this FGD.

Following on the positive feedback of last year event, this year we will continue on series of discussion related to green economy. This year, we also decide to invite collaboration with another standing committee within the House of Representatives, the Public Account Committee.

***Ladies and Gentlemen,***

The world has been in pandemic mode for a year now. Different scenarios on how the pandemic will end have been played out. Various strategies on containing the virus have been implemented. In a timeline of only a year, the pandemic has taught us more than we can learn in a decade or so.

As economies are trying to bounce back, there is a growing recognition that new measures beyond GDP is needed. The pandemic made us rethinking the growth-centric economic paradigm, which has inspired existing national and international economic policy. We have learned the fallacy of treated economic as supreme and growth is everything.

What the world need now is a transition to an economic model that is more sustainable, socially inclusive and equitable. Economic activities must be diverted toward conserve rather than exhaust the planet's finite natural resources. The transition into policies that put forward well-being over economic growth, defined by GDP, will not be easy and the

course has not defined yet. As it has been recognized by the Inter Parliamentary Union in Quito Communiqué adopted by the 128<sup>th</sup> IPU Assembly in 2013.

Pandemic gave us opportunity to build back better by moving beyond GDP and recognizing nature for their value. Governments are needed to shifting their public policies toward alignment of environment and economy. In Indonesia, for example, the Government of Indonesia has set on their policy agenda the balance between maintaining economic growth, meeting the greenhouse gas emissions reduction target, and enhancing sustainable use of natural resources. For us, parliamentarians, it is our constitutional mandate to oversee our government policies and resources on transforming the economy in the most environmentally sustainable way.

When we designing the program with WFD, we set the main outcomes of increasing MPs familiarity on the System of Environmental-Economic Accounting and strengthen MPs capacity on financial oversight of Government's policies related to green growth. I believe our discussion today will achieve the intended outcomes as we are having combination of experts that will looking at this issue from international and national perspectives. I wish you a smooth proceeding and I encourage active participation of all participants.

**Thank you.**





**Closing Remarks**  
**Hon. Dr. Fadli Zon, MP,**  
**Chair of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation**  
**The House of Representatives of**  
**the Republic of Indonesia**

*Assalamualaikum Wr, Wb.*

*Peace be upon us all,*

*Distinguished panellists and participants,*

*Ladies and Gentlemen,*

Thank you all for your participation. It has been a lively and engaging discussion.

I believe this FGD has enriched our insight on the national green growth agenda and post COVID-19 recovery plan. It has also introduced us to the System of Environmental Economic Accounting, as well as enabled us to draw on the experiences of the Public Account Committee of the UK House of Commons. We have discussed the economic rationale of placing nature at the heart of post-pandemic recovery. We gain a better understanding on the nexus of natural capital assets and the economy.

Moving forward, the viable option is to move beyond romanticizing economic growth. Economies need to adopt a method that facilitates decision-making built upon all pillars of sustainable development and enable them to deliver the 2030 Agenda.

Implementation of green economy can only succeed with the supports of all sectors of society. Today we have set a momentum for parliamentarians and parliaments to work with academia, civil society and the public. Only by working together, parliamentarians could ensure people's concerns are heard and factored into decision making process.

The pandemic has slowing us down but it must not taking away our attention from the work at hand. We need to avoid the emergence and spread of pandemic as much as we need to maintain governance, accountability and transparency of public policies and resources during pandemic.

I wish you good health and all the best.

***Thank you.***



# BKSAP Gelar FGD Tentang Pertumbuhan Hijau dengan Para Pakar

04-02-2021 / B.K.S.A.P.



*Anggota BKSAP DPR RI Fathan di sela-sela FGD di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/1/2021). Foto: Ria/nvl*

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata melalui pencanangan strategi perekonomian hijau. Bahkan, pemerintah telah memberikan komitmen sukarela untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sejak tahun 2009, yaitu sebesar 26 persen untuk dicapai pada 2020 dengan

skenario *business as usual* menggunakan sumber daya sendiri dan sebesar 41 persen untuk dicapai pada 2030 dengan dukungan internasional.

Komitmen ini ditegaskan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang diluncurkan pada November 2016 yang memprioritaskan empat sektor, termasuk penurunan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), termasuk di lahan gambut.

Komitmen yang sama telah dicantumkan di dalam tiga jilid RPJMN yang menetapkan 7 agenda prioritas. Salah satunya adalah membina lingkungan dan meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap bencana alam dan iklim melalui perbaikan kebijakan lingkungan hidup, kebencanaan dan perubahan iklim, dan pertumbuhan rendah karbon. Namun, pandemi Covid-19 dan dampak berat yang ditimbulkannya terhadap perekonomian membuat RPJMN membutuhkan penyesuaian besar.

Berdasarkan konteks tersebut, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun (DKT) untuk menghimpun pandangan dan menjajaki peluang bagi peran parlemen yang lebih aktif, khususnya pandangan dari sisi keuangan tentang kinerja pemerintah dalam pertumbuhan hijau.

“Beberapa hal yang diangkat adalah situasi terkini agenda pertumbuhan hijau Indonesia, kemajuan dalam mencapai target emisi GRK (gas rumah kaca), penggunaan sistem neraca ekonomi dan lingkungan (SEEA) oleh pemerintah dan potensi SEEA digunakan sebagai alat pengawasan keuangan oleh DPR, khususnya BAKN. FGD juga bertujuan mengetahui praktik dari parlemen lain, termasuk PAC dari House of Commons di Inggris,” ungkap Anggota BKSAP DPR RI Fathan di sela-sela FGD di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/1/2021).

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, diperlukan sebuah langkah konkret dan terukur dalam mewujudkan keseimbangan antara perlindungan sumberdaya alam dan pertumbuhan ekonomi hijau. “Kami akan mengawasi kebijakan dan sumber daya untuk mengubah ekonomi kita dengan cara yang paling ramah lingkungan,” kata Fathan.

Senada, Anggota BKSAP DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin menyampaikan apa yang dibutuhkan dunia sekarang adalah sebuah model ekonomi yang lebih berkesinambungan dan komprehensif secara sosial dan adil. “Kegiatan ekonomi harus beralih ke pelestarian, bukan menghabiskan sumber daya alam yang terbatas,” katanya.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, pembangunan berkelanjutan dengan mengusung konsep pertumbuhan hijau memerlukan peran aktif dan kerja sama dari pemerintah, sektor swasta, kelompok masyarakat sipil, akademisi dan masyarakat lokal. "Dengan demikian, ekonomi hijau akan mampu mendorong perwujudan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan menganut prinsip kesetaraan," tutupnya.

Meskipun saat ini dunia sedang dilanda Covid-19, menurut Didi aspek lingkungan hidup, aspek kesehatan dan aspek ekonomi adalah hal tidak terpisahkan yang harus dijaga dalam situasi yang sama demi masa depan kita bersama. "Jangan sampai kita konsen di penyelamatan manusia dan ekonomi, tetapi lingkungan terbengkalai. Maka penting FGD seperti ini dilakukan lagi untuk menambah pemahaman dari para ahli, baik nasional maupun internasional," tutupnya. **(rnm/sf)**

